

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Salah satu tanggung jawab badan publik ini adalah melayani kepentingan jaringan yang lebih luas atau warga pada umumnya, sama halnya sebagai pelaksana suatu program. Pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahan dilindungi dalam pemenuhan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kini diundangkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditandai dengan pemenuhan tanggung jawab di bidang kepresidenan, peningkatan, dan pembawa ke masyarakat.

Hal ini sebagian besar dapat diputuskan melalui fungsi dan potensi lembaga pemerintah masing-masing pada tingkat kritis dan terdekat dalam mengatasi tanggung jawab mereka terutama didasarkan sepenuhnya pada standar kontrol yang tepat dan akurat menuju pengenalan otoritas yang lancar dan berwibawa.

Pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemasok luar biasa layanan ke masyarakat yang merupakan perwujudan dari tugas pejabat kepresidenan sebagai pelayan masyarakat.

Angkutan umum adalah metode yang disediakan melalui otoritas untuk melayani masyarakat. Namun, sangat disayangkan bahwa masih banyak masalah yang muncul di transportasi umum yang tampaknya tidak ada gunanya untuk memperbaikinya.

Menurut Departemen Perhubungan, pembenahan kota dan peningkatan transportasi merupakan hal-hal yang dapat saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Semakin besar dimensi kota, semakin besar masalah transportasi dan krusial.

Transportasi, khususnya di lingkungan metropolitan, tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat sebagai aktor utama. Seperti yang ditunjukkan oleh kecelakaan lalu lintas, diketahui bahwa manusia adalah penyebab utama (mencapai 82,39 persen).¹ Harmoni antara klien dan operator angkutan umum harus sangat baik dan tepat untuk mengidentifikasi keamanan, perlindungan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Telah ditetapkan bahwa standar teknis dan laik jalan untuk kendaraan bermotor, serta himbauan untuk pengoperasian mobil bermotor impor, sintetis, dan impor dalam negeri di jalan, memerlukan pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala, yang disebut sebagai "KIR."

Sehingga angkutan umum, baik angkutan umum, bus, maupun kereta barang, gandengan, kereta api tempel yang boleh dioperasikan di jalan umum, wajib sesuai dengan kebijakan operasionalnya yang relevan dan salah satu kebutuhan alat angkutan umum adalah untuk memeriksa bahwa mobil itu layak di atas fondasi biasa sehingga jauh lebih layak. untuk digunakan dan dicakup di dalam buku KIR.

Buku KIR memiliki fungsi yang sangat penting dalam setiap operasi mobil, baik publik maupun swasta. Fitur utama dari buku adalah untuk memastikan

¹Pebiword"sblog,<http://sumutprov.pertumbuhan+dan+perkembangan+transportasi.com>, Di akses pada tanggal 15 Desember 2015, pukul 20.00 Wib.hlm.1.

perlindungan kendaraan untuk operasi bisnis dan perusahaan komersial. KIR selesai paling cepat satu tahun pada waktu yang tertera pada rangka kendaraan pengangkut.

Contoh lainnya adalah pengujian truk, kendaraan ini mungkin sangat mendukung dalam pendistribusian produk untuk kebutuhan manusia, sehingga pengujian perlu diselesaikan agar dapat membantu pendistribusian produk dan jasa. Berdasarkan uraian di atas, pengujian kendaraan bermotor mungkin sangat penting, untuk itu pemberian perijinan KIR pada Dinas Perhubungan di Jakarta Timur perlu diselesaikan dengan baik. Mengingat kemudahan transportasi termasuk mobil van yang mengangkut barang atau bus dan angkot yang membantu mobilitas masyarakat, maka harus lebih tinggi lagi untuk melakukan pengecekan kendaraan bermotor.



Tabel 1.1

Laporan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

DKI Jakarta

Tahun	Jenis Kendaraan	Jumlah
2014	Mobil Bus	11.049
2014	Mobil Barang	86.670
2014	Mobil Kendaraan Khusus	1.783
2014	Mobil Penumpang Umum	14.274
2015	Mobil Bus	12.234
2015	Mobil Barang	113.301
2015	Mobil Kendaraan Khusus	1.816
2015	Mobil Penumpang Umum	15.881
2016	Mobil Bus	10.936
2016	Mobil Barang	108.301
2016	Mobil Kendaraan Khusus	524
2016	Mobil Penumpang Umum	16.531

Sumber : Portal Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap 12 bulan kendaraan bermotor wajib memeriksa KIR sesuai 12 bulan. Itu terdiri dari kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang melakukan pengujian kendaraan bermotor (KIR). Itu sebabnya pelayanan yang bagus sangat penting dan ada banyak hal yang ingin

dipertimbangkan ketika uji KIR oleh Dinas Perhubungan Jakarta Timur, yaitu harus meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana agar manusia merasakan bahwa berkendara di jalan raya ganda terasa lebih aman dan ekstra nyaman.

Kebutuhan teknis dan layak jalan yang akan memperhatikan keselamatan pengguna. Fenomena ini dapat dipertimbangkan dengan menggunakan otoritas lingkungan untuk membuat cakupan di dalam area layanan uji coba kendaraan bermotor.

Dinas Perhubungan Jakarta Timur telah membuat kemajuan yang signifikan di bidang pengujian kendaraan bermotor dengan dibentuknya Unit Pengelola Uji Kendaraan Bermotor Drive Thru Pulogadung. Sebelumnya, Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung (Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor) beroperasi secara manual, namun sejak itu menerapkan sistem pelayanan aliran (Drive Thru). Dari tahun 2012 hingga 2021, pelaksanaan program drive through dinilai kurang optimal karena beberapa hal. Sebagai permulaan, terlepas dari moto layanan "26 menit", masih ada layanan pengujian kendaraan bermotor yang memakan waktu lebih dari 26 menit, yang mengakibatkan antrean drive-thru yang sangat panjang. Salah satu unsur yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah kelangkaan sumber daya manusia yaitu pekerja untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Kedua, peralatan yang digunakan untuk menguji kendaraan bermotor rentan terhadap kerusakan. Kerusakan pada instrumen memerlukan pengujian manual, yang kurang akurat. Ketiga, selain kurangnya perawatan peralatan, faktor penentu lainnya adalah kurangnya dana yang mengakibatkan perangkat tidak diganti. Kekuatan melalui aplikasi uji coba kendaraan bermotor

yang telah diterapkan dapat dikatakan berhasil, sekarang tidak lagi hanya dalam hal pencapaian tujuan, tetapi juga mendapatkan peningkatan dari hambatan yang menimpa pada tahap tertentu dalam implementasi aplikasi, khususnya melalui sarana mengevaluasi.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:
Bagaimana Kualitas Pelayanan KIR (KEUR) di Dinas Perhubungan Darat Jakarta Timur?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Kualitas Pelayanan KIR (KEUR) di Dinas Perhubungan Darat Jakarta Timur.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu:

- a) Manfaat teoritis. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang dapat dikaji dan dibahas selain dalam konteks perkembangan ilmu Administrasi Publik, masing-masing dengan bantuan penggunaan mahasiswa yang berbeda dan jaringan yang lebih luas mengenai masalah Kualitas Layanan Uji KIR. .
- b) Manfaat Praktis, pihak berwenang diharapkan lebih mengenali Uji KIR yang biasa terjadi di dalam subjek sehingga mampu menawarkan

pendekatan kualitas untuk kembali mematuhi aturan terkait, terutama dalam berkendara.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memaparkan dasar yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, teori dengan sumber dari beberapa literatur dan relevan. Teori tersebut merupakan landasan untuk melakukan analisis dan pengujian atas masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian memaparkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, proses penyusunan, alat pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, teknik analisa, juga waktu dan lokasi penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas. Struktur organisasi, deskripsi data yang menjelaskan tentang hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan pemaparan yang lebih singkat, jelas dan mudah dipahami, juga menyertakan saran yang berisi tindak lanjut dari peneliti terhadap bidang yang diteliti.

